

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti atau Tahun Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amalia Rizki S , Wiwik Setyaningsih, 2024	Perancangan Dan Penataan Ulang Lanskap Waduk Rowo Jombor Dengan Konsep Lanskap Berkelanjutan	Metode Deskriptif Kualitatif	Kriteria desain arsitektur lanskap berkelanjutan yang diterapkan dalam perancangan dan penataan ulang lanskap Rowo Jombor mencakup aspek konsep tapak, konsep bentuk, konsep peruangan, dan konsep struktur. Kriteria ini berfungsi untuk menciptakan lanskap kawasan wisata yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada SDGs serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
2	Muammar Khumaidi, Fahril Fanani, Novi Maulida Ni'mah, 2024	Penataan Kawasan Wisata Pantai Batu Menggoro Pasca Bencana Tanah Longsor Guna Menunjang Pengembangan Sektor Wisata, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,	Metode Kualitatif	hasil interpretasi Kawasan Wisata Pantai Batu Menggoro berdasarkan dengan elemen- elemen bentuk ruang serta didukung dengan hasil wawancara kepada para ahli dan tokoh masyarakat: 1. Akseibilitas dan Sirkulasi 2. Elemen Arah dan Kecepatan Angin

		Provinsi Sulawesi Selatan		<p>3. Elemen Kebisingan</p> <p>4. Elemen Vegetasi</p> <p>5. Elemen View</p> <p>6. Elemen Kontur dan Drainase</p> <p>7. Elemen Utilitas</p> <p>8. Analisis SWOT</p> <p>Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang penting dalam penataan Kawasan Wisata Pantai Batu Menggoro adalah:</p> <p>1. Penataan Ulang Vegetasi Lereng dan Ruas Jalan : Menata ulang vegetasi pada lereng dan ruas jalan dengan memanfaatkan vegetasi yang telah ada untuk pencegahan bencana tanah longsor.</p> <p>2. Penataan Ulang Vegetasi Pesisir Pantai : Menata ulang dan merawat vegetasi eksisting yang telah ada pada pesisir pantai untuk pencegahan banjir rob dengan penanaman bibit mangrove.</p> <p>3. Penataan ulang fisik ruas jalan dengan menambahkan rambu-rambu lalu lintas serta dilakukan pelebaran dan pemasangan paving block pada setiap bahu jalan.</p>
3	Rona Rafidah Salsabila, Rhisa Aidilla Suprpto, 2022	Penataan Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Dalegan Dengan Pendekatan	Metode Kualitatif Melalui Studi Literature	Kawasan wisata pantai pasir putih Dalegan dengan pendekatan Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan) yang diharapkan mampu

		Sustainable Tourism		memberi dampak lebih baik kedepannya terutama dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan kawasan wisata dan sekitarnya khususnya masyarakat setempat, serta menciptakan kawasan wisata yang inovatif dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Berikut merupakan implementasi konsep Sustainable Tourism dalam penataan Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Dalegan.
4	Sahda Salsabila, Suryono Herlambang, Parino Rahardjo, 2021	Rencana Penataan Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka, Kabupaten Tangerang	Metode Kualitatif Dan Metode Deskriptif Analisis	Secara keseluruhan dari hasil penelitian dan perencanaan yang telah dilakukan pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka, maka hasil akhir berupa pembuatan rencana Masterplan pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka dan ilustrasi dalam masterplan tersebut yang dituangkan ke bentuk 3D. Sehingga fungsi daripada hasil akhir ini yakni, bertujuan untuk Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka menjadi lebih terawat dan tertata, serta permasalahan utama pada kawasan wisata dapat teratasi.
5	Indro Sulistyanto	Penataan Kawasan Wisata Alam Sebagai	Metode Kualitatif	hasil kajian atas berbagai upaya dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten

		<p>Destinasi Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Malinau</p>	<p>Malinau, diperoleh hasil sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malinau, dicapai melalui:</p> <p>Pendekatan pengembangan melalui konsep Pariwisata Berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>)</p> <p>Pendekatan perencanaan bertumpu pada skala Komunitas Lokal (<i>Local Community Based Development</i>)</p> <p>Pendekatan pengembangan melalui konsep Keterpaduan Sisi Permintaan dan penawaran (<i>demand and supply matching</i>)</p> <p>Pendekatan pengembangan melalui konsep Ekowisata (<i>Ecotourism</i>)</p> <p>Pengembangan ekowisata bagi seluruh destinasi wisata di Kabupaten Malinau harus direncanakan dan dikembangkan berdasarkan aspek-aspek strategis sebagai berikut:</p> <p>Aspek ekologis</p> <p>Aspek estetikal z-keindahan</p> <p>Aspek ekonomi</p> <p>Aspek sosial</p>
--	--	---	--

2.2 Definisi Dasar

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. (Karyono, 1997:15). Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata diperlukan 4A yang akan menjadi dasar, meliputi:

- a. Atraksi, apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut.
- b. Aksesibilitas, sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi.
- c. Amenitas, fasilitas penunjang destinasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain.
- d. Aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung di destinasi.

Untuk mendukung dalam pengembangan tempat wisata yang ideal perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- 1) Pemahaman mengenai pengembangan wisata Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata (Gde Pitana, 2005: 101).
- 2) Batasan-batasan dalam pengembangan beserta peraturannya Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian, masing-masing dengan dua atau tiga sub-bagian, seperti
- 3) Bagian-bagian yang dikembangkan dan bentuk pengembangannya Langkah-langkah yang mendasari pengembangan dan pembangunan wisata terletak pada bagian sarana dan prasarana. Untuk menunjang kebutuhan wisatawan dan perawatan area wisata maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

2.3 Pengertian Infrastruktur

Menurut Macmillan Dictionary of Modern Economics (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Economics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Larimer (1994) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem. Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Banyak definisi dari bacaan mengenai infrastruktur menunjukkan adanya beberapa kesamaan unsur (Slootweg dan Verhoef 1999) seperti:

- a. Infrastruktur adalah suatu sistem yang besar.
- b. Infrastruktur memiliki dimensi teknologi yang kuat.
- c. Infrastruktur terdiri dari komponen fisik yang tidak dapat dipindah-pindah.
- d. Infrastruktur memberikan jasa yang penting (*necessary*) dan sulit tergantikan (*hardly replaceable*).

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonomi juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman (1958)

mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi.

Pemerintah melalui PP No.42/2005 tentang KPPI, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum dan sanitasi, telematika, listrik, dan pengangkutan migas. Penggolongan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang merupakan kepentingan umum dan dibutuhkan masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. Pengertiandiatur tidak sama dengan dibangun oleh pemerintah, karena penyediaan infrastruktur tersebut dapat bekerja sama dengan badan usaha, seperti yang diatur dalam PP RI N0.67/2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

2.3.1 Jenis Infrakstruktur Perdesaan

Jenis infrakstruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009 antara lain berupa (1) Infrakstruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan perdesaan (2) Infrakstruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan, dan (3) Infrakstruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan (Pedoman PPIP 2006).(4) Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai/danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api, (5) Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah,

jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana pembuangan sampah yang meliputi pengangkut dan pembuangan, (6) Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, (7) Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit listrik dan transmisi/distribusi tenaga listrik, (8) Infrastruktur minyak dan gas, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas.

2.3.2 Kriteria Infrakstruktur

Dalam memilih jenis infrakstruktur yang akan dilaksanakan didesa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (1) memenuhi kebutuhan infrakstruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawara desa (2) langsung meberikan manfaat bagi masyarakat setemoat terutama kelompok miskin (3) penyediaan lahan untuk infrakstruktur disediakan oleh masyarakat, dan (4) dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009 serta (5) memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal dan (6) penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat (7) merupakan infrakstruktur yang dapat dikelola masyarakat (8) menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun (9) tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial dan budaya.

2.4 Jenis – Jenis Objek Wisata

Objek wisata dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu untuk memahami ciri khas atau daya tariknya. Berikut adalah beberapa jenis objek wisata beserta kategorinya:

a. Wisata Alam

Wisata ini mengandalkan keindahan alam yang masih alami dan mempesona.

- 1) Pantai: Tempat menikmati keindahan laut, seperti Pantai Kuta di Bali.
- 2) Gunung: Cocok untuk pendaki dan pencinta alam, seperti Gunung Bromo.
- 3) Danau: Menawarkan pemandangan air tenang, seperti Danau Toba di Sumatera Utara.
- 4) Air Terjun: Keindahan air jatuh dari ketinggian, seperti Air Terjun Tumpak Sewu.
- 5) Taman Nasional: Habitat satwa dan flora langka, seperti Taman Nasional Komodo.

b. Wisata Budaya

Wisata ini berkaitan dengan sejarah, seni, dan tradisi suatu daerah.

- 1) Candi: Situs bersejarah peninggalan kerajaan, seperti Candi Borobudur.
- 2) Museum: Tempat menyimpan artefak budaya dan sejarah, seperti Museum Nasional.
- 3) Desa Adat: Memperlihatkan kehidupan tradisional, seperti Desa Adat Sade di Lombok.
- 4) Festival Tradisional: Merayakan budaya lokal, seperti Festival Sekaten di Yogyakarta.

c. Wisata Buatan

Mengutamakan fasilitas dan atraksi buatan manusia.

- 1) Taman Hiburan: Wahana permainan dan hiburan, seperti Dufan di Jakarta.
- 2) *Waterpark*: Wisata air dengan berbagai permainan, seperti Waterbom Bali.
- 3) Monumen dan Landmark: Ikon kota, seperti Monas di Jakarta.

d. Wisata Religi

Berfokus pada tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.

- 1) Tempat Ibadah: Seperti Masjid Istiqlal atau Pura Besakih.
- 2) Ziarah: Mengunjungi makam atau situs suci, seperti Makam Sunan Ampel.
- 3) Festival Religi: Perayaan keagamaan, seperti Nyepi di Bali.

e. Wisata Kuliner

Ditujukan untuk menikmati makanan khas dan keunikan kuliner suatu daerah.

- 1) Festival Makanan: Seperti Festival Durian.
- 2) Kuliner Khas: Menikmati makanan tradisional, seperti gudeg di Yogyakarta.
- 3) Pusat Kuliner: Tempat berkumpulnya pedagang makanan, seperti Pasar Malam.

f. Wisata Edukasi

Berorientasi pada pembelajaran sambil berekreasi.

- 1) Kebun Raya: Mengajarkan tentang flora, seperti Kebun Raya Bogor.
- 2) Planetarium: Tempat belajar astronomi.
- 3) Kunjungan Industri: Belajar proses produksi di pabrik atau workshop.

2.5 Sasaran Pemberdayaan Ekonomi

Sasaran pemberdayaan ekonomi merupakan masyarakat dalam bentuk pemihakan. Pemberdayaan ekonomi ditujukan kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Pemberdayaan ekonomi yang ditujukan atau menjadikan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan secara bertahap, membentuk sebuah lembaga yang mampu mengatasi masalah kemiskinan pada setiap daerah dengan menghimpun dan mengkoordinasi berbagai sumber daya dan penanggulangan kemiskinan melalui program yang dijalankan oleh pemerintah.

Sasaran dalam pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan sebagai penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif, pemantapan sistem pendataan desa, membentuk hubungan yang baik dalam komunikasi antar masyarakat, meningkatkan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dalam pemberdayaan ekonomi sasaran atau tujuan dari upaya pemberdayaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat merupakan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di wilayah pedesaan. Pemberdayaan ekonomi sangat perlu dilaksanakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan yaitu membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan, kebodohan ataupun rasa takut dalam mengambil sebuah keputusan. Kesejahteraan juga

berkaitan dengan suatu kondisi dimana setiap kebutuhan masyarakat mampu terpenuhi baik kebutuhan spiritual, material bahkan kebutuhan sosial sekalipun.

Tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- 2) Pemulihan tujuan sosial dalam mencapai kemandirian.
- 3) Membentuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan.
- 4) Memperkuat kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan.
- 5) Meningkatkan kualitas dalam mengelola, merencanakan dan mengambil keputusan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.

2.5.1 Cara Peningkatan Objek Wisata

Ada banyak cara untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas objek wisata!

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Pengembangan Infrastruktur:

- 1) Tingkatkan aksesibilitas dengan menyediakan jalan, transportasi umum, atau fasilitas parkir yang memadai.
- 2) Sediakan fasilitas dasar seperti toilet bersih, tempat makan, dan area istirahat.

b. Promosi Digital:

- 1) Gunakan media sosial dan situs *web* untuk mempromosikan destinasi wisata.
- 2) Buat konten menarik seperti foto, video, dan artikel untuk menarik perhatian wisatawan.
- 3) Manfaatkan *influencer* atau *travel blogger* untuk memperkenalkan objek wisata.

c. Pengelolaan Lingkungan:

- 1) Jaga kebersihan area wisata dengan menyediakan tempat sampah yang cukup.
- 2) Terapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan larangan penggunaan plastik sekali pakai.

d. Pengembangan Atraksi Baru:

- 1) Ciptakan pengalaman unik seperti festival budaya, area permainan, atau wisata edukasi.
- 2) Kembangkan spot foto yang Instagrammable untuk menarik wisatawan muda.

e. Peningkatan Layanan Pengunjung:

- 1) Latih staf untuk memberikan layanan yang ramah dan informatif.
- 2) Sediakan pemandu wisata yang berpengalaman untuk memberikan informasi tambahan.

f. Kemitraan dengan Komunitas Lokal:

- 1) Libatkan warga lokal dalam pengelolaan objek wisata.
- 2) Tawarkan produk dan kerajinan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar.

g. *Survey* dan *Feedback*:

- 1) Kumpulkan masukan dari pengunjung untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas.

2.5.2 Kriteria Objek Wisata Yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia

Di Indonesia, kriteria objek wisata yang sesuai dengan ketentuan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Berikut adalah beberapa kriteria utama:

a. Keberlanjutan Lingkungan:

- 1) Objek wisata harus menjaga kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan pelestarian flora serta fauna lokal.

b. Keberlanjutan Sosial dan Budaya:

- 1) Harus menghormati dan melestarikan budaya lokal, termasuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan objek wisata.

- c. Keberlanjutan Ekonomi:
 - 1) Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha lokal.
- d. Aksesibilitas:
 - 1) Memiliki akses yang mudah bagi wisatawan, termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
- e. Keamanan dan Kenyamanan:
 - 1) Menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman bagi pengunjung, seperti tanda petunjuk, penerangan, dan layanan darurat.
- f. Pengelolaan yang Baik:
 - 1) Memiliki manajemen yang profesional dan transparan, termasuk dalam hal perizinan dan pengelolaan keuangan.

Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek wisata tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal.

2.6 Penataan Ruang Objek Wisata

Penataan ruang objek wisata memerlukan perencanaan yang matang untuk menciptakan pengalaman yang nyaman, menarik, dan berkelanjutan bagi pengunjung. Berikut adalah beberapa langkah utama yang dapat dilakukan:

a. Zonasi Area:

- 1) Bagi area wisata menjadi beberapa zona, seperti zona inti (area utama untuk atraksi), zona penunjang (toilet, kafe, parkir), dan zona konservasi (untuk pelestarian lingkungan).
- 2) Pastikan setiap zona memiliki fungsi yang jelas dan saling mendukung.

b. Sirkulasi dan Aksesibilitas:

- 1) Rancang jalur yang memudahkan pengunjung untuk bergerak, seperti jalur satu arah atau berbentuk lingkaran.
- 2) Sediakan akses untuk penyandang disabilitas, seperti jalur landai dan lift jika diperlukan.

c. Desain Estetika:

- 1) Gunakan elemen lokal, seperti ukiran khas atau tanaman asli, untuk menciptakan identitas unik.
- 2) Pilih material yang ramah lingkungan dan tahan lama, seperti kayu atau batu alam.

d. Fasilitas Pendukung:

- 1) Pastikan tersedia fasilitas dasar seperti toilet bersih, tempat sampah terpilah, dan area istirahat.
- 2) Tambahkan fasilitas tambahan seperti area bermain anak atau spot foto Instagrammable.

e. Pengelolaan Lingkungan:

- 1) Terapkan sistem pengelolaan limbah yang baik untuk menjaga kebersihan.
- 2) Gunakan energi terbarukan, seperti panel surya, untuk mendukung operasional.

f. Partisipasi Masyarakat Lokal:

- 1) Libatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan, sehingga mereka merasa memiliki dan mendukung keberlanjutan objek wisata.

2.7 Permasalahan Mengenai Objek Wisata

2.7.1 Dari Masyarakat

a. Kurangnya kesadaran lingkungan:

- 1) Beberapa masyarakat lokal mungkin tidak memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata.

b. Konflik kepentingan:

- 1) Ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat lokal dan pengembangan pariwisata, seperti penggunaan lahan atau sumber daya alam.

c. Kurangnya partisipasi:

- 1) Masyarakat lokal sering kali tidak dalam pengolahan objek wisata, sehingga mereka merasa tidak memiliki manfaat langsung.

2.7.2 Dari Pemerintah

- a. Kurangnya infrastruktur:
 - 1) Banyak objek wisata yang sulit diakses karena jalan yang buruk atau kurangnya fasilitas umum seperti toilet dan tempat parkir.
- b. Pengelolaan yang tidak efektif:
 - 1) Koordinasi antar lembaga pemerintah sering kali lemah, sehingga pengelolaan objek wisata menjadi tidak optimal.
- c. Minimnya anggaran:
 - 1) Dana untuk promosi dan pengembangan objek wisata sering kali terbatas, sehingga potensi wisata tidak tergarap maksimal.

2.7.3 Dari Alam

- a. Kerusakan lingkungan:
 - 1) Aktivitas wisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan erosi, pencemaran, atau kerusakan ekosistem.
- b. Bencana alam:
 - 1) Objek wisata yang berada di daerah rawan bencana, seperti gunung berapi atau pantai, sering kali menghadapi risiko kerusakan akibat gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung.
- c. Perubahan iklim:
 - 1) Perubahan cuaca ekstrem dapat memengaruhi daya tarik dan keberlanjutan objek wisata alam.

2.8 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. jika ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok masyarakat meskipun pemerintah juga telah memberikan peluang, maka partisipasi tidak akan terjadi. Jika ada kemauan serta kemampuan tetapi tidak ada ruang dan kesempatan untuk warga masyarakat maka partisipasi juga tidak akan terjadi.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan.

Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ Kelurahan)

kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrembang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrembang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. sesuai dengan ini bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berpartisipasi baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan terutama pada program-program fisik seperti, Kantor Desa, Jalan, Jembatan, dan lainnya, meskipun adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa, semangat partisipasi masyarakat di desa belum juga terlihat

Partisipasi Masyarakat adalah bahwa partisipasi tidak hanya dipandang dari sisi fiksikal semata. Selama ini menurutnya ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi apabila dia sudah terlibat secara fisik seperti ikut berkerja bakti, ikut membantu matrial, menghadiri pengajian. Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi sebenarnya tidak sesempit itu. Pemikiran atau sumbang saran dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud partisipasi. 7 jadi dapat diartikan partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dan selalu memecahkan permasalahan bersama.

Menurut Suparjan menyebutkan alasan penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut.

- a. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan *handarbeni (sense of belonging)* terhadap keberlanjutan pembangunan.
- b. Dengan partisipasi masyarakat meningkatkan posisi tawar menawar harga sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal.
- c. dengan partisipasi masyarakat mampu mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya moral dari *investor*.

2.9 Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik alasan dari dalam, mau pun dari luar. dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perenacanan, pelaksanaan, pengendalian (pemantau, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu Yadap, mengemukakan tentang adanya partisipasi di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam: pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di wilayah setempat

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi banyak (yang umumnya lebih dikenal miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas yang kaya) dalam banyak hal terdapat banyak hal memperoleh.

2.9.1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan

desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

2.9.2 Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Dalam hal ini berlaku melihat tingkat partisipasi masyarakat dimana perencanaan merupakan tahapan awal dari pembangunan infarastruktur yang akan dilakukan sehingga pembanganan yang di lakukan dapat berjalan dengan harapan masyarakat. Menurut data yang penulis dapatkan di lapangan mengenai keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dalam percanaan pembangunan.

2.9.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan.